

IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH (PUSYAR) DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT MELALUI PEMBIAYAAN UMKM YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MOJOKERTO

Feny Indrasari

12040674254 (Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: fenyindrasari@yahoo.com

Tauran, S.Sos.,M.Soc.Sc.

0013047602 (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) email: Tauran_unesa@yahoo.com

ABSTRAK

Program PUSYAR berlandaskan Perda Nomor 03 pasal 20 ayat 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang kemudian diaplikasikan dengan MOU kerjasama PUSYAR. Tujuan pelaksanaan program PUSYAR ialah untuk memberdayakan UMKM yang ada di kota Mojokerto, karena potensi UMKM yang ada di kota Mojokerto cukup banyak namun kurang bisa mengembangkan usahanya karena faktor permodalan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM yang Dilaksanakan Oleh BAZNAS Kota Mojokerto.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari Kepala kantor dan staff BAZNAS kota Mojokerto, PT. BPRS kota Mojokerto, Diskoperindag kota Mojokerto, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) kota Mojokerto, dan peserta program PUSYAR. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 3 macam, meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program PUSYAR yang dilaksanakan oleh BAZNAS kota Mojokerto, dapat dilihat dari 2 variabel model analisis Mirelle S. Grindle, meliputi Isi Kebijakan yang didalamnya terdapat beberapa dimensi yaitu pertama dimensi *target groups*, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya. Dari keenam dimensi tersebut yang ada kendala terkait dalam keberhasilan implementasi program PUSYAR ialah dimensi letak pengambilan keputusan, dimana mekanisme pengajuan menjadi peserta program PUSYAR yang cukup panjang sehingga prosesnya cukup lama, dan sumber daya, disini yang ada kendala pada sumber daya manusia yang belum sepenuhnya menjalankan fungsi atau tugasnya dengan maksimal. Kedua, variabel Lingkungan kebijakan, meliputi, dimensi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, dimensi karakteristik lembaga dan penguasa, serta dimensi kepatuhan dan daya tanggap. Indikator pertama dan kedua dapat disimpulkan sudah cukup sesuai dengan harapan, namun untuk indikator yang ketiga dikatakan masih lemah, indikator ketiga ini sama halnya dengan indikator letak pengambilan keputusan pada variabel isi kebijakan. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya warga yang mengeluh karena proses pengajuan yang membutuhkan waktu cukup lama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi program PUSYAR yang dilaksanakan oleh BAZNAS kota Mojokerto masih terdapat beberapa kendala, maka saran dari peneliti adalah pengawasan terhadap pelaksanaan usaha penerima bantuan PUSYAR lebih baik ditingkatkan lagi agar program PUSYAR dapat dinilai sempurna sebagai program yang berhasil dalam meningkatkan penghasilan masyarakat Kota Mojokerto melalui UMK/IKM, perbaikan proses perijinan guna meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan proses pengajuan, inovasi ini harus berkelanjutan dan direkomendasikan menjadi tugas pokok fungsi daerah agar bisa dijaga kelangsungannya, perlu direplikasi dan hal ini sudah dimulai beberapa daerah di Jawa timur sudah menerapkan sistem yang sama.

Kata Kunci : Implementasi, Program PUSYAR

ABSTRACT

Program PUSYAR based on regional regulations number 03 article 20 paragraph 3 in 2010 about the management of zakat, alms, and infak which is then applied with a MOU of cooperation PUSYAR. The purpose of the implementation of the program of PUSYAR is to empower UMKM existing in the town of Mojokerto, UMKM because of the potential that exists in the town of Mojokerto quite a lot but less could develop his business due to capital one. This research aims to describe the implementation of Sharia business financing Programme (PUSYAR) in an effort to Prosper Through Community financing of UMKM conducted by the BAZNAS city of Mojokerto.

The kind of research used is research descriptive by adopting both qualitative. The subject of study consisting of a head office and the BAZNAS Mojokerto city, PT. BPRS Mojokerto city, Diskoperindag Mojokerto city, the community economic syariah (MES) Mojokerto city, and participate in the program PUSYAR. Technique data collection was carried out by using 3 kind of, covering observation, interview, and documentation. Data analysis done by means of data collection, reduction data, presentation of data, and the withdrawal of conclusion.

The results showed the execution of a program implemented by the PUSYAR BAZNAS of the city of Mojokerto, can be seen from the 2 variables model analysis Mirelle S. Grindle, covers the content of the policy therein contained multiple dimensions IE first dimension of target groups, types of benefits, the degree of the desired changes, the position of decision making, program implementation, and resources. The dimensions of the six existing constraints related in the success of program implementation PUSYAR is the location of the dimension of decision making, where the filing mechanism into the PUSYAR program participants is long enough so that the process is quite long, and resources, here the existing constraints on human resources have not been fully run the function or task with the maximum. Second, environment variable policy, covering, dimensions power, interests, and strategies actors are involved, dimensions characteristic institutions and ruler of, and dimensions compliance and responsiveness. Indicators first and second can be concluded is enough in conformity with expectation, but for indicators the third said weak, the third indicator even with an indicator site of decision marking on the variables of the contents of policy. This is evidenced by there are still many residents have complained since the process licensing who takes a very long time, because of a lack of a response from each parties in handle the process licensing to participate in PUSYAR.

So can be concluded that the implementation PUSYAR program that is carried out by BAZNAS city Mojokerto there are still several obstacles, so advice of researchers is supervision with the implementation of the business recipient PUSYAR will be better be increased again that the program PUSYAR can be assessed perfect as a program that successful in improving the community incomes city Mojokerto through UMKM/IKM, repair processes licensing which long enough to minimize awkwardness people in doing the process licensing, this innovation have to be sustainable and recommended the basic function the region so can be maintained continuance, need to is replicated and it is already Some areas in east java have applied the same system.

Keywords: Implementation , PUSYAR program

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang banyak dihadapi oleh negara berkembang, seperti Indonesia. Jumlah penduduk miskin Indonesia pada bulan Maret tahun 2015 ini bertambah dibanding pada September 2014. Pada bulan Maret 2015, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 %), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2014 sebesar 27,73 juta orang (10,96 %). Pemerintah telah melakukan berbagai langkah produktif bagi

terwujudnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Seperti memberikan pinjaman dari bank milik pemerintah, penyaluran kredit bebas agunan, dan lain – lain. Selain bantuan dari lembaga perbankan, keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan lembaga keuangan syariah juga ikut berkontribusi positif bagi pengembangan usaha masyarakat. Apabila membahas hal yang berkaitan dengan syariah, dewasa ini zakat juga dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan ekonomi untuk

mempersempit kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin.

Di Indonesia sendiri pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Salah satu Pemerintah Daerah (Pemda) yang memberi perhatian terhadap zakat adalah kota Mojokerto, pengelolaan zakat yang pertama diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang zakat, infak dan sedekah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Selain dalam peraturan Daerah juga diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/715a/417.111/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/49/417.111/2011 Tentang Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto Periode Tahun 2011-2014.

BAZNAS Kota Mojokerto adalah sebuah badan yang mengelola zakat, infak, dan sedekah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto atas dasar usulan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Keberadaan BAZNAS di Kota Mojokerto sangatlah berarti di mata masyarakat Kota Mojokerto, BAZNAS kota Mojokerto memiliki beberapa program dan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS yaitu Ashnaf fakir-miskin (beasiswa rutin, biaya kesehatan, perbaikan rumah, dan lain-lain), Ashnaf Ibnu Sabil (biaya perjalanan orang terlantar), Ashnaf Sabilillah (bantuan khitanan massal, koperasi syariah), Ashnaf Amil (biaya administrasi dan ATK distribusi ZIS, transport studi banding ke BAZNAS pusat, dan lain-lain), dan Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR). Dalam penelitian ini akan dibahas tentang salah satu program yang merupakan inovasi baru tentang pembiayaan yang berbasis syariah yaitu program PUSYAR.

PUSYAR yaitu Program Pembiayaan Usaha Syari'ah yang bekerjasama dengan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota

Mojokerto dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mojokerto untuk memberdayakan UKM/IKM Kota Mojokerto, karena potensi UKM/IKM yang ada di kota Mojokerto juga cukup banyak namun kurang berkembang, hal itu disebabkan salah satunya oleh faktor modal. Oleh karena itu, program ini memberikan pinjaman modal kepada UKM/IKM Kota Mojokerto dengan sistem syari'ah. Dimana peserta PUSYAR tidak dikenakan biaya margin, administrasi dan asuransi. Biaya tersebut ditanggung oleh BAZNAS Kota Mojokerto yang diambilkan dari dana Infaq dan Shodaqoh sebesar 15%. Sehingga dengan adanya program PUSYAR membantu para pengusaha yang ada di kota Mojokerto untuk bisa mengembangkan usahanya, namun dalam kenyataannya suatu program yang dilaksanakan oleh suatu organisasi memiliki problematika dalam implementasinya di lapangan. Pada saat penelitian awal tentang program PUSYAR ini, peneliti menemukan beberapa masalah dalam implementasinya yaitu kurangnya pengawasan pada peserta program PUSYAR dan proses pengajuan yang membutuhkan waktu cukup lama.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka penelitian ini berjudul "IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH (PUSYAR) DALAM UPAYA MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT MELALUI PEMBIAYAAN UMKM YANG DILAKSANAKAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MOJOKERTO".

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM yang Dilaksanakan Oleh BAZNAS Kota Mojokerto?

3. TUJUAN

Sehubungan dengan latar belakang diatas dan penentuan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) Dalam Upaya Mensejahterakan

Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM yang Dilaksanakan Oleh BAZNAS Kota Mojokerto.

4. MANFAAT

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian tentang Implementasi Program Pembiayaan Usaha Syariah (Pusyar) Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM yang Dilaksanakan Oleh BAZNAS Kota Mojokerto memberikan sumbangsih ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan teori implementasi kebijakan publik.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Kantor BAZ Kota Mojokerto

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambahan ilmu tentang implementasi kebijakan publik, sehingga dapat melakukan perbaikan untuk pelaksanaan selanjutnya dan mempertahankan konsep kebijakan publik yang sudah baik.

2) Bagi UNESA

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi dalam menambah kajian teori tentang pembiayaan usaha berbasis syariah, khususnya dalam kajian Implementasi Program PUSYAR.

3) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mahasiswa, khususnya di bidang Ilmu Administrasi Negara tentang Implementasi Program PUSYAR. Selanjutnya, bagi yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan, maka hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lainnya.

KAJIAN PUSTAKA

1. Kebijakan publik

Dunn (2000:132) mendefinisikan secara lebih detail mengenai kebijakan publik (*public policy*) ialah suatu pola ketergantungan secara kompleks dalam pilihan – pilihan kolektif, termasuk suatu keputusan untuk tidak bertindak yang ditentukan oleh Badan atau Kantor Pemerintah, namun terbentuk kebijakan publik juga dapat dilatarbelakangi oleh para aktor dan faktor diluar pemerintah.

2. Unsur – unsur implementasi

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan atau program, ada beberapa unsur – unsur implementasi yang harus diperhatikan, Tachan (2006:26) menjelaskan tentang unsur – unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu:

- a. Unsur Pelaksana
- b. Adanya program yang dilaksanakan
- c. Target group atau kelompok sasaran

METODE

Penelitian ini tentang “Implementasi Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM yang Dilaksanakan Oleh BAZNAS Kota Mojokerto” merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bentuk penelitian ini terfokuskan pada Implementasi model Mirelle S. Grindle, yang meliputi :

1. Isi Kebijakan
 - a. *Target Groups*
 - b. Tipe manfaat
 - c. Derajat perubahan yang diinginkan
 - d. Letak pengambilan keputusan
 - e. Pelaksanaan program
 - f. Sumber daya

2. Lingkungan Kebijakan

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tanggap

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto yang beralamatkan di jalan Gajah Mada No. 115A Kota Mojokerto. Alasan peneliti melakukan penelitian pada BAZNAS Kota Mojokerto karena program PUSYAR di daerah lain belum ada yang melakukan inovasi ini pertama kali dicanangkan di Kota Mojokerto. Untuk subyek penelitiannya yaitu Kepala dan staff kantor BAZNAS Kota Mojokerto, Diskoperindag Kota Mojokerto, BPRS Kota Mojokerto, dan MES Kota Mojokerto. penelitian ini menggunakan 3 metode teknik pengumpulan data, meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik merupakan suatu penetapan kebijakan dalam tahap perumusannya dilakukan oleh instansi pelaksana, namun bentuk perumusan kebijakan tersebut disesuaikan oleh kebutuhan lingkungan sekitar sehingga akan menghasilkan dampak positif atau negatif. Disisi lain, ketika bentuk kebijakan publik tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, maka secara otomatis kebijakan tersebut dapat mengatur paksa masyarakat untuk mengikutinya sesuai dengan pilihan tindakan pemerintah guna mencapai tujuan Negara. Pada saat kebijakan diimplementasikan dengan hasil yang muncul tidak sesuai dengan yang direncanakan, akan dapat memunculkan permasalahan sosial dari pihak masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan suatu pendekatan yang dikendalikan oleh pelaksana kebijakan guna menyelesaikan permasalahan sosial, sehingga dengan implementasi kebijakan dapat menciptakan suatu hasil sesuai dengan tujuan ditetapkan. Penelitian mengenai Implementasi Program PUSYAR Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM yang Dilaksanakan Oleh BAZNAS Kota Mojokerto, akan dianalisis menggunakan model implementasi menurut Merilee S. Grindle yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Implementasi Program PUSYAR Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM yang Dilaksanakan Oleh BAZNAS Kota Mojokerto, sebagaimana telah diatur dalam nota kesepahaman atau MoU PUSYAR.

Kedua variabel tersebut akan dijabarkan secara berurutan dan lebih mendalam, sebagaimana dianalisis berasal dari data dan informasi yang diperoleh dari BAZNAS kota Mojokerto, BPRS kota Mojokerto, Diskoperindag kota Mojokerto, MES kota Mojokerto, dan peserta program PUSYAR guna menjawab fokus penelitian ini. Berikut ini merupakan pemaparan dari analisis Implementasi Program PUSYAR Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM yang Dilaksanakan Oleh BAZNAS Kota Mojokerto, menggunakan dua variabel menurut Merilee S. Grindle yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

1. Isi Kebijakan

Pada variabel isi kebijakan terdapat 6 indikator yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, meliputi :

- a. *Interest Affected* (kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan);

Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan – kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Program PUSYAR Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM yang Dilaksanakan Oleh BAZNAS Kota Mojokerto bahwa dalam menjalankan programnya melibatkan empat kepentingan yaitu pihak BAZNAS kota Mojokerto, PT.BPRS kota Mojokerto, Diskoperindag kota Mojokerto, dan MES kota Mojokerto. Masing – masing pihak memberikan kontribusi dalam pengimplementasian program PUSYAR dan sejauh ini kontribusi yang diberikan dari masing – masing pihak sudah cukup sesuai dengan tupoksi tugasnya. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya proses perijinan untuk menjadi peserta program PUSYAR yang tertuang dalam mekanisme pengajuan program PUSYAR. Sehingga masing – masing pihak dalam program ini saling memberikan pengaruh yang besar untuk kesuksesan proses perijinan.

b. *Type of Benefits (Jenis Manfaat yang akan dihasilkan);*

Pada poin ini dimaksudkan adanya dampak positif yang dihasilkan dari adanya program PUSYAR yang dilaksanakan oleh BAZNAS kota Mojokerto. Sebagaimana tercantum dalam MoU PUSYAR pasal 1 yang menyebutkan bahwa maksud tujuan untuk

melaksanakan Program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR) dan memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi Usaha Kecil Menengah dan Industri Kecil Menengah yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disingkat UKM dan IKM Kota Mojokerto. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat kota Mojokerto yang mempunyai usaha UKM/IKM mulai merasakan dampak positif dengan adanya program PUSYAR, karena mereka bisa mengembangkan usahanya dengan meminjam modal yang tanpa timbul biaya margin, administrasi, dan asuransi. Sehingga mereka hanya murni mengembalikan pinjaman yang telah disetujui sebelumnya.

c. *Extent of change Envision (Derajat perubahan yang diinginkan);*

Dengan adanya program PUSYAR diharapkan tingkat ekonomi masyarakat kota Mojokerto semakin meningkat sehingga kesejahteraan masyarakatnya juga semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Nur Khanan selaku bagian Administrasi, SDM, dan umum di BAZNAS kota Mojokerto bahwa semakin banyaknya UKM/IKM kota Mojokerto yang semakin berkembang dari sebelumnya. Untuk UKM/IKM di kota Mojokerto pada tahun 2015 yang tersebar di 18 kelurahan sebanyak 181.

d. *Site of Decision Marking (letak pengambilan keputusan);*

Untuk dimensi *Site of Decision Marking* tentang implementasi program PUSYAR sudah sesuai dengan mekanismenya. Dari hasil penelitian yang dijelaskan

oleh Bapak Nur Khanan bahwa mekanisme pengajuan sampai lolos atau tidaknya menjadi peserta PUSYAR sudah diatur dan disepakati oleh keempat pihak yang berkepentingan dalam proses perijinan. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengajuan menjadi peserta program PUSYAR.

e. *Program Implementor* (Siapa pelaksana Program);

Dalam MoU PUSYAR sudah dijelaskan siapa saja pelaksana program dan apa saja tugasnya dari masing - masing pihak, Pelaksana program PUSYAR sendiri yaitu BAZNAS kota Mojokerto, BPRS kota Mojokerto, dan Diskoperindag kota Mojokerto. Dengan begitu sudah jelas pelaksana/implementor yang berkontribusi dalam program PUSYAR.

f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan).

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan - ketentuan atau aturan - aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Kota Mojokerto tentunya mempunyai sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat termasuk dalam mengimplementasikan Peraturan

Daerah sebagai suatu produk hukum daerah. Sumberdaya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal, maka implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Untuk implementasi program PUSYAR mengenai SDM dari keempat pihak yang berkontribusi dalam program PUSYAR ada yang menjalankan tugasnya belum sesuai dengan tupoksinya yaitu pihak MES kota Mojokerto, informasi tersebut didukung dari hasil wawancara dengan salah satu peserta program PUSYAR, warga tersebut menjelaskan bahwa fungsi dari pihak MES yang sebenarnya adalah melakukan pengawasan terhadap usaha yang dimiliki peserta PUSYAR. Namun dalam

implementasinya pihak MES kurang melakukan pengawasan.

2) Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran yang digunakan oleh BAZNAS kota Mojokerto dalam menanggung biaya margin, asuransi, dan administrasi program PUSYAR diambilkan dari sebagian dana ZIS, dan dana untuk membiayai biaya operasional BAZNAS berasal dari dana APBD yang diberikan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya untuk pencairan dana pinjaman yang diajukan akan di proses oleh pihak BPRS kota Mojokerto.

2. Lingkungan Kebijakan

Untuk variabel lingkungan kebijakan ada 6 dimensi didalamnya, yaitu :

a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat;

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Program PUSYAR Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM yang Dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Mojokerto bahwa masing - masing kepentingan atau pihak yang berkontribusi untuk program PUSYAR dalam menjalankan fungsinya sudah cukup baik. Karena dari awal melakukan kerjasama sudah ada kesepakatan dalam pembagian tugasnya yang tertuang dalam MoU program PUSYAR.

b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Pelaksanaan program PUSYAR yang dilaksanakan oleh BAZNAS kota Mojokerto bekerjasama dengan BPRS, dan Diskoperindag kota Mojokerto yang mana sudah dipaparkan diatas. Dari masing - masing lembaga tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda, termasuk dalam hal pelayanan. Hasil penelitian akan menjelaskan karakteristik dari masing - masing lembaga, dimana pihak BAZNAS mempunyai karakteristik yang cekatan dan ramah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, hal tersebut tidak jauh beda dengan pihak BPRS kota Mojokerto yang sangat ramah dalam memberikan pelayanan, namun beda dengan Diskoperindag kota Mojokerto dimana para pegawai tidak begitu cekatan dan kurang ramah.

c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh kemauan, keinginan, dan kecenderungan perilaku implementor kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh - sungguh guna mencapai tujuan yang ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi fokus penelitian dalam variabel ini ialah kepatuhan dan respon dari masing - masing pihak dalam melaksanakan program PUSYAR.

Kepatuhan dari masing - masing pihak dalam melaksanakan fungsinya mencapai target yang

diinginkan, namun untuk respon dari pelaksana bisa dikatakan masih lemah, dan panjangnya jalur proses pengajuan sedikit rumit yang membutuhkan waktu cukup lama sebagaimana sesuai dengan pemaparan Bapak Nur Khanan selaku bagian Administrasi, SDM, dan Umum di kantor BAZNAS kota Mojokerto.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan atau program menurut Mirelle S. Grindle, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Implementasi Program PUSYAR Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat Melalui Pembiayaan UMKM yang Dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Mojokerto berlandaskan perda Nomor 03 Tahun 2010 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang kemudian diaplikasikan dengan MOU kerjasama PUSYAR, yakni : Implementasi dapat dipengaruhi oleh Isi Kebijakan, meliputi *Interest Affected, Type of Benefits, Extent of change Envision, Site of Decision Marking, Program Implementor, dan Resources Committed*. Dari keenam dimensi tersebut yang ada kendala terkait dalam keberhasilan implementasi program PUSYAR ialah dimensi *Site of Decision Marking* (letak pengambilan keputusan), dimana mekanisme pengajuan menjadi peserta program PUSYAR yang cukup panjang sehingga prosesnya cukup lama, dan *Resources Committed* (sumber daya), disini yang ada kendala pada sumber daya manusia yang belum sepenuhnya menjalankan fungsi atau tugasnya dengan maksimal.

Implementasi juga dipengaruhi oleh variabel Lingkungan Kebijakan didalamnya terdapat indikator, meliputi *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved, Institution and Regime Characteristic, dan Compliance and Responsiveness*. Indikator pertama dan kedua dapat disimpulkan sudah cukup sesuai dengan harapan, namun untuk indikator yang ketiga dikatakan masih lemah, indikator ketiga ini

sama halnya dengan indikator *Site of Decision Marking* pada variabel isi kebijakan. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya warga yang mengeluh karena proses pengajuan yang membutuhkan waktu cukup lama, karena kurangnya respon dari masing – masing pihak dalam menangani proses perijinan untuk menjadi peserta PUSYAR dan mekanisme pengajuan yang terlalu rumit.

SARAN

berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai masukan :

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha penerima bantuan PUSYAR akan lebih baik ditingkatkan lagi agar program PUSYAR dapat dinilai sempurna sebagai program yang berhasil dalam meningkatkan penghasilan masyarakat Kota Mojokerto melalui UKM/IKM.
2. Perbaiki proses perijinan yang cukup panjang guna meningkatkan minat masyarakat dalam melakukan proses perijinan
3. Melakukan inovasi seperti perijinan berbasis online, dan ini harus berkelanjutan dan direkomendasikan menjadi tugas pokok fungsi daerah agar bisa dijaga kelangsungannya
4. Perlu direplikasi dan hal ini sudah dimulai beberapa daerah di Jawa timur sudah menerapkan sistem yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- BAZ Kota Mojokerto, *Bulletin Al-Ashnaf Edisi 10 Triwulan II 2013*, (Mojokerto: CreativeGeneration, 2013),
- Dunn, N William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mukhtar.2013. Metode Penelitian Deskriptif kualitatif. Jakarta: GP Press Group.
- Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Parson, Wayne. 2005. Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana.
- Riduwan. 2013. Skala Pengukuran Variabel – Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, Agus. 2008. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Teori Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soewadji, Jusuf. 2012. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia).
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model – model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. Asas Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. 2005. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Peraturan daerah Nomor 3 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah <http://bps.go.id/brs/view/id/1158>(Diakses pada tanggal 20 Februari 2016).
- <http://bazpamekasan.blogspot.co.id/2011/02/uraian-tugas-pengurus-badan-amil-zakat.html#sthash.1iRTkGyk.dpuf>(Diakses pada tanggal 3 Maret 2016)